



RENCANA KERJA (RENJA)

2025

**INSPEKTORAT
KAB TEMANGGUNG**

 (0293) 492422

 inspektorat.temanggungkab.go.id

 temanggunginspektorat@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, M.M
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator,



TAUFAN RINALDI, S.STP.
NIP. 199707072020081003

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung Juli 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si, CGCAE *AB*

Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
KATA PENGANTAR		iii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	: PENDAHULUAN.	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	6
	1.3 Maksud dan Tujuan	8
	1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	10
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung	26
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung	41
	2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	42
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	50
	2.6 Inovasi Perangkat Daerah	50
	2.7 Penghargaan / Prestasi	50
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	51
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	55
	4.1 Program dan Kegiatan	55
BAB V	PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat s/d Tahun 2023	11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat s.d Triwulan I Tahun 2024	17
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2024	27
Tabel 2.4 Nomenklatur Indikator pada Data Pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	40
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	43
Tabel 2.6 Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung	50
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025	52
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025	56
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

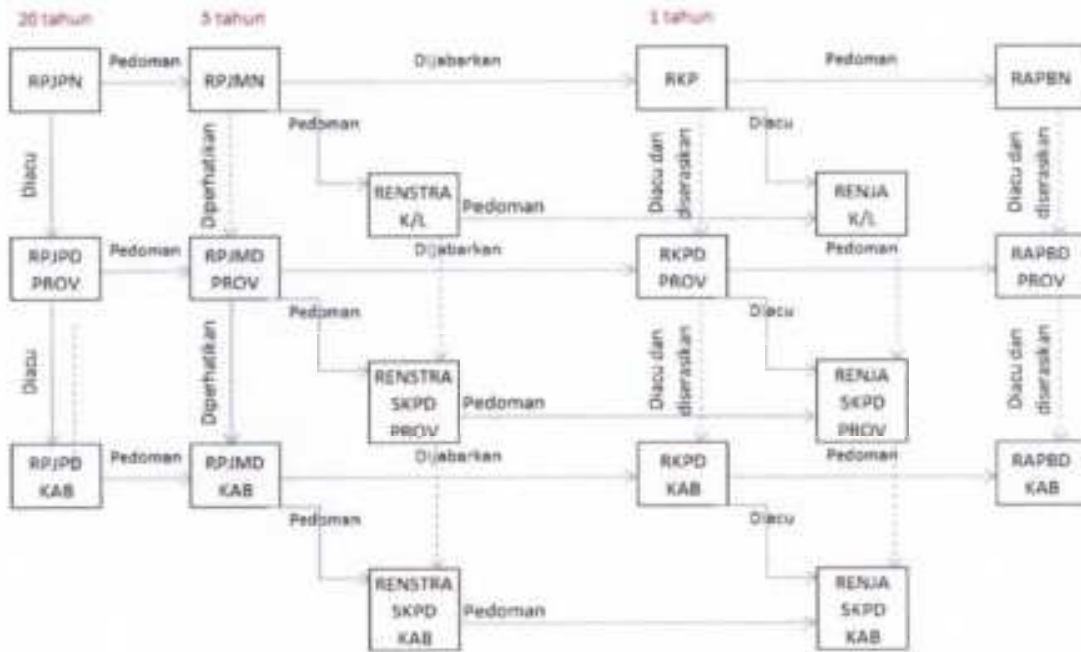
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Inspektorat Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
- 4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat.

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur

kinerja pelayanan Inspektorat;

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan

tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPd;

Telaah terhadap rancangan awal RKPd, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPd;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat;

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan

saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat .

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Inspektorat Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V	PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai terakhir pelaksanaan Renstra Inspektorat 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat
s.d Tahun 2023

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01	PENGAWASAN						6.631.926.827	7.034.307.890		6.941.509.473		98,68
60101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BALU)		-	-	100	5.863.494.827	6.237.876.290	100	6.187.526.797	100	99,19
601012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-		5.459.664.827	5.821.312.597		5.802.600.427		99,81
601012.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	-	-	51	5.449.664.827	5.811.312.597	51	5.792.605.427	100	99,68
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS	Orang/Bulan	-	-	51		3.034.722.521	51	3.018.999.802	100	99,48
		Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	Orang/Bulan	-	-	51		2.776.590.076	51	2.773.605.625	100	99,89
601012.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	12	10.000.000	10.000.000	12	9.995.000	100	99,95
601012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-		20.000.000	19.088.000		18.841.800		98,71
601012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	37	20.000.000	19.088.000	37	18.841.800	100	98,71
601012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-		172.830.000	186.330.300		161.206.004		85,53

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
601012.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	-	-	5	2.000.000	2.000.000	5	1.984.000	100	99,20
601012.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	12	25.000.000	20.609.500	12	14.954.000	100	72,56
601012.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	12	35.000.000	34.000.000	12	26.057.300	100	76,64
601012.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	12	42.830.000	18.790.000	12	16.445.085	100	87,52
601012.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	12	68.000.000	110.930.800	12	101.765.619	100	91,74
601012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	-	-		135.000.000	121.852.000		120.066.300		97,90
601012.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			17	35.000.000	26.804.800	17	25.941.300	100	96,78
601012.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			17	100.000.000	95.047.200	17	94.125.000	100	99,03
601012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	-	-		9.000.000	6.499.000		6.431.400		99,06

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
601012.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	12	5.000.000	2.500.000	12	2.487.000	100	99,48
601012.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	12	4.000.000	3.999.000	12	3.944.400	100	98,63
601012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-		67.000.000	82.794.393		78.380.866		94,67
601012.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	15	60.000.000	75.798.393	15	71.445.866	100	94,26
601012.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	6	2.500.000	2.496.000	6	2.475.000	100	99,16
601012.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	23	4.500.000	4.500.000	23	4.460.000	100	99,11
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan					-	468.716.000	466.437.600		446.385.155		95,70
		Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100		100			100		100	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46		46			100		100	
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23		23			49,82		100	

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48		48			98,11		100	
601022.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						418.716.000	408.437.600		390.346.625		324,88
601022.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	4	-	4	8.000.000	7.999.900	4	6.702.000	100	100
601022.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	54	-	54	110.000.000	99.722.000	86	99.428.280	159	159,26
601022.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	64	-	64	80.000.000	80.000.000	96	78.185.750	150	150
601022.01.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	52	-	52	85.000.000	85.000.000	59	81.239.894	113	113,46
601022.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	Dokumen	180	-	180	135.716.000	135.715.700	1.983	124.790.701	1.102	1.102
601022.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						50.000.000	58.000.000		56.038.530		250
601022.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	-	-	2	11.000.000	11.000.000	2	10.707.580	100	100
601022.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	-	-	3	39.000.000	47.000.000	12	45.330.950	400	400

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						299.716.000	329.994.000		307.597.521		93,21
		Nilai Maturitas SPIP	Level	3,3		3,30			30		90,91	
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60		20			100		100	
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100		100			100		100	
		Nilai Survey Penilaian Integritas	angka	81,97		81,97			77,37		94,39	
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100		100			100		100	
601032.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						36.000.000	46.278.000		41.869.900		100
601032.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	-	-	1	36.000.000	46.278.000	1	41.869.900	100	100
601032.02	Pendampingan dan Asistensi						253.716.000	283.716.000		265.727.621		385

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
601032.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	-	-	15	230.716.000	250.716.000	15	237.512.121	100	100
601032.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	-	-	10	33.000.000	33.000.000	57	28.215.500	570	570

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2023

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat
s.d Triwulan I Tahun 2024

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PENGAWASAN						6.384.492.597	8.468.351.436	67	1.223.462.012				
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		-	-	100	5.578.356.597	7.443.136.436	34,90	1.190.694.202	34,90	1.190.694.202	34,90	16
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-		5.148.106.597	7.072.886.436		1.153.874.031		1.153.874.031	63	8,17
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	-	51	5.133.106.597	7.057.886.436	51	1.153.874.031	51	1.153.874.031	100	16,35
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	-	-	12	15.000.000	15.000.000	3	-	3	-	25	0
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	51	40.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	51	40.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	10,2	161.511.200	156.511.200	3	12.451.873	3	12.451.873	35	7

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	13	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	-	-	3	2.500.000	2.500.000	8	200.000	8	200.000	100	8
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	12	20.000.000	20.000.000	0	-	-	-	-	0
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	12	30.000.000	25.000.000	3	-	3	-	25	0
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	12	45.000.000	25.000.000	3	4.083.650	3	4.083.650	25	16,33
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	12	64.011.200	84.011.200	3	8.168.223	3	8.168.223	25	9,72
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	-	-	6	120.000.000	80.000.000	5,50	-	5,50	-	87,50	-
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			8	30.000.000	20.000.000	8	-	8		100	-
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit			4	90.000.000	44.000.000	3	-	3		75	-
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			3	30.000.000	16.000.000	1	-	1		33	

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	13	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	-	-	12	30.738.800	30.738.800	3	5.656.055	3	5.656.055	25	2
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	12	3.000.000	3.000.000	3	122.000	3	122.000	25	4,07
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	12	5.000.000	5.000.000	3	-	3	-	25	0
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	12	22.738.800	22.738.800	3	5.534.055	3		25	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	57	78.000.000	83.000.000	23	18.712.243	23	18.712.243	51,95	22,54
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	14	70.000.000	70.000.000	4	13.202.743	4	13.202.743	28,57	18,86
2	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	10	3.000.000	3.000.000	10	3.000.000	10	3.000.000	100	100
3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	-	-	33	5.000.000	10.000.000	9	2.509.500	9	2.509.500	27,27	25,10

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	13	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan					-	550.215.000	662.215.000	17,10	19.867.755	17,10	19.867.755		3
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	80,28		61					95,77			
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	38,17		48								
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	91,17		63								
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100		100								
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100		100								
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						490.215.000	552.215.000	17	13.569.755	17	13.569.755	18,92	1,60

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	Laporan	-	-	5	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	0
2	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	-	-	110	147.215.000	147.215.000	64	200.000	64	200.000	58	0,14
3	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	-	-	61	80.000.000	80.000.000	10	1.369.500	10	1.369.500	16	1,71
4	Pengawasan Desa	Jumlah Hasil pengawasan Desa	Laporan	-	-	45	90.000.000	90.000.000	9	1.200.000	9	1.200.000	20	1,33
5	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Dokumen	-	-	90	163.000.000	225.000.000	-	10.800.255	-	10.800.255	-	4,80
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						60.000.000	110.000.000	1	6.298.000	1	6.298.000	54,17	8,37
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian kerugian Negara	Laporan	-	-	1	15.000.000	35.000.000	-	5.478.000	-	5.478.000	100	15,65
2	Pengawasan dgn Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Degan Tujuan Tertentu	Laporan	-	-	12	45.000.000	75.000.000	1	820.000	1	820.000	8,33	1,09

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						255.921.000	363.000.000	15	12.900.055	15	12.900.055		3,5537
		Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100		100							100	
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100		100							100	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	na		20							-	
		Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	na		3							-	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					1	67.921.000	50.000.000	-	-	-	-	0	0
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Rekomendasi	-	-	1	67.921.000	50.000.000	-	-	-	-	0	0

NO	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Pendampingan dan Asistensi					-	188.000.000	313.000.000	15	12.900.055	15	12.900.055	46	4,12
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Kegiatan	-	-	7	150.000.000	125.000.000	4	6.284.055	4	6.284.055	57	5,03
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah			48	125.000.000	150.000.000	11	6.616.000	11	6.616.000	23	4,41
3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat daerah	-	-	46	38.000.000	38.000.000	26	-	26	-	57	0

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU);
 - b. Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - c. Prosentase pelaksanaan pengasawan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
 - d. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara;
 - e. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa;
 - f. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 - g. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - h. Nilai Survey Penilaian Integritas; dan
 - i. Persentase penanganan aduan Masyarakat.
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan capaian 100%, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Pengadaan Mebel;
 - j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - l. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - n. Pemeliharaan Mebel;
 - o. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara;
 - p. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - q. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - r. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - s. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
- a. Reviu Laporan Kinerja (159 %);
 - b. Reviu Laporan Keuangan (150%);
 - c. Pengawasan Desa (113%);
 - d. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (1.102%);
 - e. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (400%); dan
 - f. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (570%)
4. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
- a. Nilai Maturitas SPIP (90,91%);
 - b. Nilai Survey Penilaian Integritas (94,39%)

5. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Pada Tahun 2023 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah nihil

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,53%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung Target tercapai 100%
2. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya Target tercapai 97,06%

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung
Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	na	93,7	93,8	93,9	93,05			99,31	ST				
2	Maturitas SPIP	Nilai	3,0	39	3,12	3,12	30			99,70	ST				
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	na	2,92	2,93	2,95	2,91			99,66	ST				
4	Kapabilitas APIP	Level	n.a	3	3	3	3			100	ST				
5	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	100	61	75	81	71			100	ST				
6	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	100	48	53	59	51			100	ST				
7	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	100	63	79	94	106			100	ST				
8	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100	100	100			100	ST				
9	Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100	100	100			100	ST				
10	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan	%	100	100	100	100	0			0				SR	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian				
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		ST	T	S	R	SR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)														
11	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100	100	100			100	ST				
12	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	n.a	20	54	100	56,52			100	ST				
13	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	level	n.a	3	3	3	30			100	ST				
	Jumlah Indikator Sasaran	4	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							99,67	4	0	0		
	Jumlah Indikator Program	9	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM							88,89	8	0	1		
	Jumlah Total Indikator Inspektorat	13	RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PENGAWASAN							94,28	12	0	1		

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 11 Indikator terdiri dari:

a. Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP)

KPK

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

a) Masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan timeline rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI)

b) Perangkat Daerah terkait terlambat dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester IV.

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:

a) Diperlukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan dengan lebih baik.

b) Diharapkan agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

b. Maturitas SPIP

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :

- Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP

1. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung

2. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;

3. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda

- Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- a) Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- b) Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c) APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- d) Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- a) Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
- b) Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
- c) Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)
- d) Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan

Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada
OPD

c. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah

- a) Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutahiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK.
- b) Menyempurnakan Renstra OPD untuk menyatakan secara tertulis kebijakan antikorupsi.
- c) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko korupsi.
- d) Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system.
- e) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk menyusun pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku terkait Pengendalian Fraud di lingkungan Pemerintah Daerah.
- f) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang.

2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah

- a) Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi.
- b) Perlu meningkatkan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah.
- c) Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal, belum dilakukan;
- d) Penilaian risiko korupsi belum dilakukan.
- e) Komitmen pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan.
- f) Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan

3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- a) Peningkatkan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penugasan pengukuran IEPK;
 - b) Upaya peningkatan IEPK secara terintegrasi dengan Upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - c) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.
- d. Kapabilitas APIP
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah.
 - a) mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat,
 - b) memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti Diklat Khusus STAR dengan pola pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Program STAR,
 - c) para pegawai secara mandiri berusaha meningkatkan kompetensi dengan menambah wawasan sendiri dengan cara rajin membaca maupun berdiskusi mengenai aturan terbaru,
 - d) melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dimana pegawai yang pernah mengikuti suatu diklat dapat mentransfer ilmu yang diperoleh kepada teman-teman di kantor,
 - e) membentuk Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP,
 - f) pada saat melaksanakan tugas pengawasan para pegawai membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang diketahui oleh Inspektur,
 - g) melakukan reviu berjenjangan pada setiap tugas audit sehingga dapat menghasilkan laporan yang baik,
 - h) para pimpinan mengajak agar bersemangat untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga output yang dihasilkan oleh Inspektorat dapat dihargai,
 - i) membuat Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan telah dibuat secara berkala, dan
 - j) memerintahkan agar seluruh SOP kegiatan dapat dilengkapi.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a) kompetensi SDM belum memadai,
 - b) kuantitas SDM belum memadai,
 - c) kurangnya komitmen,
 - d) kurangnya komunikasi,
 - e) anggaran belum memadai,
 - f) perencanaan kegiatan belum memadai,
 - g) sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan belum memadai.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas APIP sebagai stimulan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya;
 - b) mempertimbangkan untuk melakukan penambahan dana operasional yang memadai sebesar 1,5% dari APBD;
 - c) menetapkan mekanisme pemberian reward/penghargaan bagi pegawai yang berkinerja memuaskan;
 - d) melaksanakan evaluasi intern dan ekstern melalui kegiatan Program Jaminan Kualitas dan Peningkatan (Quality Assurance and Improvement Program/QAIP) dan Telaah Sejawat guna menjamin mutu dan kualitas audit Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 - e) melakukan reviu atas Internal Audit Charter;
 - f) melakukan penyegaran kembali terhadap Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP dengan memperhatikan kompetensi dari masing-masing anggota tim;
 - g) melibatkan semua tenaga pemeriksa dalam perencanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) guna mengetahui dan menganalisis area kritis mana yang ditemui selama melakukan pengawasan.
- e. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peraturan yang mendukung :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b) Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d) PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e) Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas dokumen perencanaan Pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
- f. Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Beberapa reviu telah menggunakan aplikasi;
 - b) Pengumpulan data telah melalui google drive;
 - c) Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a) Keterbatasan SDM;
 - b) Penugasan yang tumpang tindih dengan beberapa penugasan lain;
 - c) Penugasan yang mendesak di luar PKPT;
 - d) Daerah kurang responsif dalam melengkapi data yang diperlukan;
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
 - a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam Tim;
 - b) Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT untuk

- meminimalisir tumpang tindih penugasan;
- c) Untuk penugasan yang melibatkan beberapa OPD, dilaksanakan rapat koordinasi sebelum penugasan;
 - d) Pembagian penugasan internal tim dan mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya penyelesaian laporan tepat waktu;
 - e) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal tim maupun eksternal dengan PD terkait pemenuhan dokumen melalui media IT.
- g. Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peraturan :
 - a) Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b) Perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c) Mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa;
 - b) jumlah personil yang terbatas;
 - c) belum semuanya dapat dilakukan pengawasan;
 - d) adanya penugasan mandatori diluar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa;
 - b) Personil melaksanakan tugas tambahan;
 - c) pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko;
 - d) Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya
- h. Persentase penanganan aduan Masyarakat
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - a) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung,

- b) SOP Pengaduan;
 - c) Adanya anggaran pendukung kegiatan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
- a) Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas;
 - b) Belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN;
 - c) Belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian negara
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat;
- a) Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PPKN;
 - b) Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya;
 - c) Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan

i. Persentase tindak lanjut hasil temuan

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah :
 - a) Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
 - b) Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
 - c) Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
 - d) Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - e) Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
 - a) kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
 - b) Temuan pemeriksaaan terkait kebijakan lama

- ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu
- c) Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi
 - d) SDM APIP kurang/terbatas
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
- a) Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
 - b) Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 - c) Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
- j. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
 - b) Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
 - c) Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
 - d) Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
 - e) Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - f) Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
 - a) Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
 - b) Kurangnya SDM auditor;
 - c) Kurang pahamnya OPD mengenai benturan kepentingan;
 - d) Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;

- e) Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
- a) Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
 - b) Sosialisasi benturan kepentingan;
 - c) Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
- k. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
Sebagian besar perangkat daerah telah menyusun risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
Belum semua Pegawai memahami tentang manajemen risiko
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah:
Melaksanakan asistensi/pendampingan tentang manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah
- l. Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan
- a) Faktor pendorong indikator tersebut adalah:
 - 1). Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP
 - Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
 - Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan pemkab Temanggung;
 - Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda
 - 2) Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng
 - b) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - 1) Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;

- 2) Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
 - 3) APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
 - 4) Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang
- c) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :
- 1) Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
 - 2) Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - 3) Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun)
 - 4) Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD
2. Capaian indikator dengan status sangat rendah ada 1 (satu) yaitu:
- Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona

integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

a. Faktor pendorong indikator tersebut adalah:

- 1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
- 2) Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
- 3) Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung

b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah:

- 1) Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
- 2) Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
- 3) Adanya mutasi pegawai

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- 1) Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas;
- 2) Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI;
- 3) Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Inspektorat terdiri dari 1 (satu) jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Urusan Inspektorat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Nomenklatur Indikator pada Data Pokok
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
	INDIKATOR SASARAN				
1	Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	93,7	93,8	93,9
2	Maturitas SPIP	Nilai	39	3,12	3,12

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,92	2,93	2,95
4	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3
INDIKATOR PROGRAM					
1	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	61	75	81
2	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	48	53	59
3	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	%	63	79	94
4	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	100
5	Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100	100
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100	100
8	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	20	54	100
9	Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	level	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja Inspektorat dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan Inspektorat sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat dari 13 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, yaitu :

Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Faktor yang penghambat indikator tersebut adalah:

- 1) Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - 2) Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - 3) Adanya mutasi pegawai
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain :
- a. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (terkait dengan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK RI);
 - b. Upaya peningkatkan Nilai Survei Penilaian Integritas;
 - c. Peningkatan Pendampingan Perangkat Daerah yang diusulkan menuju ZI;
 - d. Upaya Peningkatan Nilai MCP Kabupaten Temanggung;
 - e. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
 - f. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
 - g. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
 - h. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Dibandingkan dengan Pagu Rancangan awal RPKD terdapat kenaikan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp 299.999.165.- Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
INSPEKTORAT						8.214.917.086
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8.214.917.086
INSPEKTORAT DAERAH						8.214.917.086
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	%	7.394.614.036
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51 dan 12	Orang dan Dokumen	7.062.886.436
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang	7.057.886.436
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	5.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51	Orang	20.000.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51	Orang	20.000.000

HASIL PENETAPAN							
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
INSPEKTORAT						8.514.916.251	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8.514.916.251	
INSPEKTORAT DAERAH						8.514.916.251	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	%	7.549.108.651	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51 dan 12	Orang dan Dokumen	7.067.886.436	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	Orang	7.057.886.436	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	10.000.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51	Orang	55.000.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51	Orang	55.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	27 dan 24	Paket dan Laporan	104.011.200
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12	Paket	2.500.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12	Paket	11.511.200
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12	Paket	15.000.000
d	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12	Laporan	15.000.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	Laporan	60.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor</i>	33	Unit	55.000.000

HASIL PENETAPAN							
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	27 dan 24	Paket dan Laporan	156.511.200	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12	Paket	2.500.000	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12	Paket	20.000.000	
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12	Paket	20.000.000	
d	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	12	Laporan	20.000.000	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	Laporan	94.011.200	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor</i>	33	Unit	84.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	-
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	55.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	79.716.400
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	Laporan	2.500.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	74.216.400
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	73.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Mebel, Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	57	Unit	65.000.000

HASIL PENETAPAN							
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	8.500.000	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	59.500.000	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	16.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	Laporan	82.216.400	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	3.000.000	
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5.000.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	74.216.400	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Mebel, Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	57	Unit	103.494.615	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	3.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	5.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	Unit	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1. <i>Persentase pelaksan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi</i>	75	%	536.194.215
			2. <i>Persentase pelaksan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara</i>	53	%	
			3. <i>Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa</i>	79	%	
			4. <i>persentase penanganan aduan masyarakat</i>	100	%	
			5. <i>persentase tindak lanjut hasil temuan</i>	100	%	

HASIL PENETAPAN							
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	93.494.615	
b	Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	3.000.000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33	Unit	7.000.000	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1. <i>Persentase pelaksan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi</i>	75	%	628.546.400	
			2. <i>Persentase pelaksan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara</i>	53	%		
			3. <i>Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa</i>	79	%		
			4. <i>persentase penanganan aduan masyarakat</i>	100	%		
			5. <i>persentase tindak lanjut hasil temuan</i>	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal Jumlah laporan hasil Pengawasan Kinerja	244 dan 85		443.530.215
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Laporan	8.424.000
b	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120	Laporan	124.013.916
c	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	61	Laporan	67.392.000
d	Pengawasan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45	Laporan	75.816.000
e	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85	Dokumen	167.884.299
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	13	Laporan	92.664.000

HASIL PENETAPAN							
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal Jumlah laporan hasil Pengawasan Kinerja	244 dan 85		518.546.400	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Laporan	10.000.000	
b	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120	Laporan	147.215.000	
c	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	61	Laporan	80.000.000	
d	Pengawasan Desa	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45	Laporan	90.000.000	
e	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85	Dokumen	191.331.400	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	13	Laporan	110.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	29.484.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	63.160.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	284.108.835
			2. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%	
			3. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%	
			4. Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun	1	Rekomendasi	42.120.000

HASIL PENETAPAN							
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	35.000.000	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	75.000.000	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1. Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100	%	337.261.200	
			2. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%		
			3. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54	%		
			4. Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3	Level		
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun	1	Rekomendasi	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025						
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	42.120.000
2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah pendampingan dan asistensi Jumlah pendampingan dan asistensi	7 dan 94	Kegiatan dan Perangkat Daerah	241.988.835
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	Perangkat Daerah	126.360.000
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Kegiatan	83.617.635
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	Perangkat Daerah	32.011.200
JUMLAH						8.214.917.086

Sumber : Inspektprat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

HASIL PENETAPAN							
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	50.000.000	
2	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah pendampingan dan asistensi Jumlah pendampingan dan asistensi	7 dan 94	Kegiatan dan Perangkat Daerah	287.261.200	
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46	Perangkat Daerah	149.261.200	
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Kegiatan	100.000.000	
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Temanggung	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46	Perangkat Daerah	38.000.000	
JUMLAH						8.514.916.251	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengampu program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang lebih efektif, pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan program Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan pembuatan "Pondok Baca Anti Korupsi" yang bertujuan untuk meningkatkan pencegahan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Sebagaimana disajikan pada table bperikut :

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung
2019-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pemanfaatan Platform Google Sheet Sebagai Perpustakaan Pedoman Bagi Penugasan Audit Di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Pegawai Inspektorat	APBD				Inspektorat - 2024

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan semester 1 Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Temanggung belum pernah mendapatkan penghargaan baik skala kabupaten, skala Provinsi maupun nasional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen pemerintahan;
2. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026		
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	nilai	B	B		
			Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	93,80	93,90		
			Maturitas SPIP	Level	3,12	3,12		
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	angka	2,93	2,95		
			Kapabilitas APIP	angka	3	3		
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	75	81	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	53	59	
				Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	79	94	
				Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100	
				Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100	
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	54	100
			Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	3	3

Sumber : Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Inspektorat Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Inspektorat Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+/-)
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Indikatif	NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.394.614.036	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.549.108.651	154.494.615
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.062.886.436	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.067.886.436	5.000.000
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.886.436	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.886.436	0
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	5.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000	35.000.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.000.000	35.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.011.200	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.511.200	52.500.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	0
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.511.200	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	8.488.800
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	5.000.000
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	5.000.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.011.200	34.011.200
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.000.000	29.000.000

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2025		
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Indikatif
a	Pengadaan Mebel	-
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.716.400
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.216.400
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.000.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	536.194.215
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	443.530.215
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8.424.000
b	Reviu Laporan Kinerja	124.013.916

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+/-)
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
a	Pengadaan Mebel	8.500.000	8.500.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.500.000	4.500.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.000.000	16.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.216.400	2.500.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	500.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	2.000.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.216.400	0
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.494.615	30.494.615
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.494.615	28.494.615
b	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	0
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	2.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	628.546.400	92.352.185
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	518.546.400	75.016.185
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000	1.576.000
b	Reviu Laporan Kinerja	147.215.000	23.201.084

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2025		
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Indikatif
c	Reviu Laporan Keuangan	67.392.000
d	Pengawasan Desa	75.816.000
e	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	167.884.299
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	92.664.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	29.484.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	63.180.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	284.108.835
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	42.120.000
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	42.120.000
2	Pendampingan dan Asistensi	241.988.835
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	126.360.000
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	83.617.635
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32.011.200
J U M L A H		8.214.917.086

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+/-)
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	12.608.000
d	Pengawasan Desa	90.000.000	14.184.000
e	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	191.331.400	23.447.101
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	110.000.000	17.336.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	35.000.000	5.516.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	75.000.000	11.820.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	337.261.200	53.152.365
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	50.000.000	7.880.000
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	50.000.000	7.880.000
2	Pendampingan dan Asistensi	287.261.200	45.272.365
a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	149.261.200	22.901.200
b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100.000.000	16.382.365
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38.000.000	5.988.800
J U M L A H		8.514.916.251	299.999.165

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp.299.999.165,-. Kenaikan pagu berdasarkan masih dibutuhkannya biaya peningkatan kapasitas SDM APIP, sosialisasi anti korupsi pada sekolah, untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang kearsipan, mesin absensi, LCD Laptop dan printer, dan juga masih dibutuhkan biaya untuk perbaikan kendaraan operasional lebih dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung
Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INSPEKTORAT				8.514.916.251				8.673.771.436
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				8.514.916.251				8.673.771.436
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				8.514.916.251				8.673.771.436
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah</i>		100 %	7.549.108.651			100 %	7.652.636.436
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		44 Orang dan Dokumen 51 Orang	7.067.886.436			-	7.077.886.436
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Temanggung	51 Orang/bulan	7.057.886.436	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.057.886.436
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Kab. Temanggung	12 Dokumen	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			20.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Kab. Temanggung	51 Orang	55.000.000			-	60.000.000
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Kab. Temanggung	51 Orang	55.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			60.000.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> <i>Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik, Barang cetak dan Penggandaan</i> <i>umlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik, Barang cetak dan Penggandaan</i>		27 dan 24 Paket dan Laporan 24 Laporan 27 Paket	156.511.200			-	210.750.000
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12 Paket	2.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			3.000.000
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12 Paket	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			25.000.000
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12 Paket	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			35.000.000
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Kab. Temanggung	12 Laporan	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			45.000.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Temanggung	12 Laporan	94.011.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			102.750.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Mebel dan Peralatan mesin yang terbeli Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana Gedung Kantor</i>		13 Unit 20 Unit	84.000.000			-	130.000.000
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	2 Unit	8.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10.000.000
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	10 Unit	59.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			100.000.000
6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	2 Unit	16.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			20.000.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		24 Laporan	82.216.400			-	84.000.000
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kab. Temanggung	12 Laporan	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			4.000.000
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12 Laporan	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.000.000
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Temanggung	12 Laporan	74.216.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			75.000.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas, Mebel, Peralatan dan Mesin yang Dipelihara</i>		57 Unit	103.494.615			-	90.000.000
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab. Temanggung	14 Unit	93.494.615	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			80.000.000
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	Kab. Temanggung	10 Unit	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.000.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Temanggung	33 Unit	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. <i>Persentase pelaksan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi</i> 2. <i>Persentase pelaksan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara</i> 3. <i>Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa</i> 4. <i>persentase penanganan aduan masyarakat</i> 5. <i>persentase tindak lanjut hasil temuan</i>		75 % 53 % 79 % 100 % 100 %	628.546.400			81 % 59 % 94 % 100 % 100 %	555.215.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal Jumlah laporan hasil Pengawasan Kinerja</i>		231 dan 85 Laporan dan Dokumen 13 Laporan	518.546.400				493.215.000
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	Kab. Temanggung	3 Laporan	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			10.000.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	Kab. Temanggung	120 Laporan	147.215.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			147.215.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	Kab. Temanggung	61 Laporan	80.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			80.000.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa</i>	Kab. Temanggung	45 Laporan	90.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			91.000.000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	Kab. Temanggung	85 Dokumen	191.331.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			165.000.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu</i>		13 Laporan	110.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	62.000.000
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	Kab. Temanggung	1 Laporan	35.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			16.000.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	Kab. Temanggung	12 Laporan	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			46.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi 3. Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya 4. Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan		100 % 100 % 54 % Level 3	337.261.200			100 % 100 % 100 % Level 3	465.920.000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun		1 Rekomend asi	50.000.000			-	67.920.000
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Temanggung	1 Rekomend asi	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			67.920.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi Jumlah pendampingan dan asistensi		7 Kegiatan 94 Perangkat Daerah	287.261.200			-	398.000.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Temanggung	46 perangkat daerah	149.261.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			200.000.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Temanggung	7 Kegiatan	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			150.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	Kab. Temanggung	46 perangkat daerah	38.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			48.000.000
JUMLAH					8.514.916.251				8.673.771.436

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024 (SIPD)

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.6.941.509.473,- (98,68) dari Pagu penetapan Perubahan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.7.034.307.890,- terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,68 %, realisasi Belanja Modal sebesar 98,53%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I sebesar Rp.3.935.045.805,- dari Pagu Penetapan Anggaran Tahun 2024 Rp.8.468.351.436,- terdiri dari Belanja Operasional sebesar 46,47%, realisasi Belanja Modal sebesar 88,34%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Inspektorat mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 8.514.916.251,- yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Pendampingan dan Asistensi..

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Inspektorat dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2024.

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 196612111994031005